



RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : P.16/P2SDM/SET/REN.0/10/2016
TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pencapaian target kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2017, serta penjabaran lebih lanjut implementasi program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Nomor P.5/SETBP2SDM/2015, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017 melalui peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-undang ...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana PJMN Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2017 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2017 ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Oktober 2016

KEPALA BADAN,



DR. IR. BAMBANG SOEPIJANTO, M.M
NIP. 19561215 198203 1 002

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Tahun 2017 ini dapat diwujudkan. Rencana Kerja BP2SDM Tahun 2017 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019 sekaligus merupakan tindak lanjut kinerja dan capaian target sesuai arahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.



Paradigma dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran ke depan tidak lagi menganut *money follow function* akan tetapi *money follow program*, artinya penggunaan anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan program menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial, artinya pencapaian prioritas pembangunan memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional dan program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan basis kewilayahan.

Secara keseluruhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyumbang 14 dari 23 prioritas nasional yang tersebar pada 21 program prioritas dan 47 kegiatan prioritas. Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM sebagai unit *supporting* eselon I lain, terlibat pada 3 prioritas nasional yaitu Revolusi Mental, Antar Kelompok Pendapatan, serta Desa dan Kawasan Pedesaan.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman perencanaan bagi setiap satuan kerja lingkup BP2SDM untuk mewujudkan target-target Tahun 2017. Selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, saya berpesan agar dokumen ini dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh setiap satker lingkup BP2SDM. Untuk itu, setiap kepala satuan kerja harus aktif mengawal organisasinya sehingga tujuan program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM serta tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dapat terwujud.

Akhir kata, Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita semua untuk selalu memenuhi kinerja sesuai yang diharapkan. Selamat bekerja, dan tanamkan selalu sikap integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Jakarta,

Dr. Ir. Bambang Soepijanto, MM
NIP. 19561215 198203 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	2
II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP2SDM	3
1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
2. Kebijakan	5
III. PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	7
IV. CAPAIAN KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016	10
1. Program dan Kegiatan	10
2. Alokasi Anggaran Tahun 2016	12
3. Progress Kemajuan Tahun Berjalan	15
V. RENCANA KERJA TAHUN 2017	19
VI. PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM....	4
Tabel 2.	Indikator kinerja kegiatan per satuan kerja Badan P2SDM Tahun 2017	8
Tabel 3.	Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2016.....	10
Tabel 4.	Target Kinerja dan Rincian Output Kegiatan Tahun 2016 berdasarkan APBN 2016	11
Tabel 5.	Rincian Alokasi Anggaran APBN Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016	12
Tabel 6.	Distribusi Alokasi Anggaran APBN-P Satker Pusat dan UPT	12
Tabel 7.	Perubahan target/output kegiatan akibat adanya perubahan pagu APBN-P Badan P2SDM Tahun 2016	14
Tabel 8.	Capaian pelaksanaan kinerja s.d April 2016 dan prognosis realisasi hingga Desember 2016	15
Tabel 9.	Capaian indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM s/d September 2016	17
Tabel 10.	Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan sumber dana.....	19
Tabel 11.	Distribusi alokasi anggaran per masing – masing satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM	19
Tabel 12.	Target rencana kinerja Badan P2SDM sesuai RPJM dan Pagu Indikatif berdasarkan prioritas nasional Tahun 2017.....	21

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam suatu Kementerian/Lembaga, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian penting dalam menjalankan dan memajukan program atau kegiatan yang disusun. SDM yang kompeten dan profesional merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Presiden ke-3 Indonesia, Prof. Dr. –Ing B.J. Habibie, FREng. pernah mengatakan *“Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul dan berdaya saing akan mengantarkan Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain”*.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) sebagai *supporting system* unit Kementerian LHK lainnya memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan SDM yang kompeten dan profesional.

Untuk mewujudkan SDM yang kompeten, profesional dan berkualitas, banyak tantangan yang akan dihadapi. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin. Dalam salah satu pidato Menteri LHK, disebutkan bahwa rimbawan saat ini masih kurang kokoh dalam komitmen, disiplin dan kesungguhan bekerja. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti kapasitas integritas dan profesionalitas yang kurang. Oleh karena itu, kita harus terus

berupaya untuk mengembangkan program lingkungan hidup dan kehutanan yang sesuai dengan titik berat pengorganisasian, pendayagunaan sumberdaya dan penguatan aspek legal dan peraturan teknisnya.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019. Dokumen rencana kerja BP2SDM Tahun 2017 di dalamnya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker lingkup BP2SDM dengan mengacu pula pada RKP Tahun 2017. Melalui dokumen Renja ini, setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja lingkup Badan P2SDM harus mengacu pada dokumen ini.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, penyusunan dokumen Renja BP2SDM Tahun 2017 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan P2SDM Tahun 2015-2019 serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyusunan Renja juga didasari pada hasil kesepakatan *trilateral meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen yang disusun setiap tahun sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan. Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2017 ini, disusun sebagai acuan seluruh satuan

kerja lingkup Badan P2SDM sekaligus untuk menjadi arah kegiatan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam jangka waktu satu tahun anggaran (Tahun 2017).

3. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2017 ini mencakup informasi mengenai:

- a. Tujuan Pembangunan LHK, Sasaran Strategis, serta Sasaran Program.
- b. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Program, Output, dan Komponen Kegiatan.
- c. Prakiraan alokasi pendanaan program/kegiatan Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai Pagu Indikatif.
- d. Hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup BP2SDM pada Tahun 2016

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BP2SDM

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

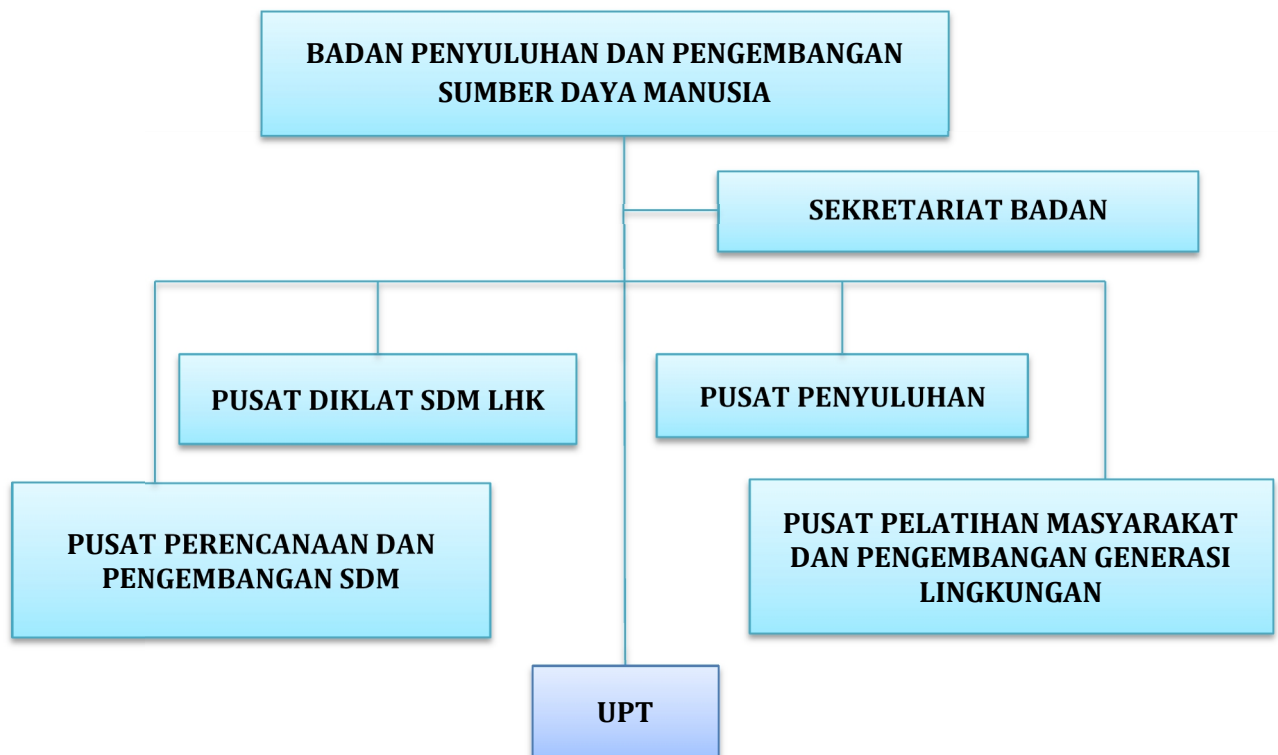
Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung pula oleh unit kerja eselon II meliputi Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Pusat Diklat SDM LHK, Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan, Pusat Penyuluhan dan Sekretariat Badan. Badan P2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 12 UPT yang terdiri dari 7 Balai Diklat LHK dan 5 SMK Kehutanan Negeri (Tabel 2).

Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Badan P2SDM memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi,

- pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standardisasi, pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengembangan generasi lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan P2SDM; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

No	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A. Pusat			
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	
3.	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Serpong	
4.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	
B. UPT Balai Diklat LHK (PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)			
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta; Banten; Lampung; Kalimantan Barat; Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Unit Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C. SMK Kehutanan Negeri (PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

2. KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Tema RKP Tahun 2017 adalah “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah”.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 tersebut, pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat 14 prioritas pembangunan nasional yang termasuk ke dalam 5 dimensi yaitu:

- **Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat**

1. Revolusi Mental
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Permukiman

- **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

1. Kedaulatan Pangan
2. Maritim dan Kelautan
3. Kedaulatan Energi
4. Pembangunan Pariwisata
5. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

- **Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan**

1. Antar Kelompok Pendapatan
2. Reforma Agraria
3. Desa dan Kawasan Pedesaan
4. Perkotaan

- **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

1. Reformulasi Regulasi, Kepastian dan Penegakan Hukum

- **Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

1. Peningkatan Ekspor Non-Migas

Berdasarkan rencana strategis Kementerian LHK Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan SDA untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Mengacu pada arah kebijakan dan pembangunan dan sasaran strategis Kementerian LHK, sasaran program BP2SDM terbagi menjadi dua yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Mendukung Peningkatan Devisa dan Penerimaan Negara.
2. Meningkatnya Daya Saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Mendukung Peningkatan Keseimbangan Ekosistem.

Untuk mendukung terwujudnya keberhasilan tujuan dan arah kebijakan pembangunan nasional, pada Tahun 2017 terdapat 11 kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam 3 program prioritas nasional yaitu 'Revolusi Mental', 'Antar Kelompok Pendapatan' serta 'Desa Dan Kawasan Pedesaan'.

III. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Program kerja Badan P2SDM Tahun 2017 sesuai Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2015-2019 adalah Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Sasaran dari penyelenggaraan program ini adalah meningkatnya daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyelenggaraan Program tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui 5 (lima) butir kegiatan utama dan 1 (satu) butir kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, atau secara terperinci yaitu:

- a. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
- e. Peningkatan Penyuluhan;
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Berdasarkan hasil RKP Tahun 2017, 11 kegiatan dari 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan P2SDM termasuk ke dalam 3 prioritas nasional (Tabel 10) yaitu:

1. Prioritas Nasional Revolusi Mental

Program Prioritas Nasional: Peneguhan Jati Diri Dan Karakter Bangsa

- Kegiatan Prioritas Nasional: Pendidikan Berbasis Karakter
- Kegiatan Prioritas Nasional: Lingkungan Satuan Pendidikan yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan

2. Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan

Program Prioritas Nasional: Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil

- Kegiatan Prioritas Nasional: Koperasi dan Kemitraan Usaha
- Kegiatan Prioritas Nasional: Keterampilan Usaha

3. Prioritas Nasional Desa dan Kawasan Pedesaan

Program Prioritas Nasional: Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

- Kegiatan Prioritas Nasional: Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA, Pengelolaan LH dan Teknologi Tepat Guna



Gambar 2. Pelaksana prioritas nasional Satker lingkup Badan P2SDM

Kinerja organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada Tahun 2017 dilihat dari capaian yang diukur melalui indikator kinerja kegiatan (output). Setiap

satuan kerja Badan P2SDM memiliki indikator kinerja masing-masing, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator kinerja kegiatan per satuan kerja Badan P2SDM Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
<i>Perencanaan Pengembangan SDM</i> Sasaran: Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 210 orang (pembiayaan sebanyak 810 orang)* b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang
<i>Peningkatan Penyuluhan</i> Sasaran: Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	a. Jumlah kelas kelompok tani hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha 450 KTH b. Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, 10 unit c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 10 unit d. Jumlah tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 300 orang

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK</i> Sasaran: Meningkatkan kapasitas SDM LHK	a. Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat, 3.000 orang b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 85 orang c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 210 orang e. Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 300 orang
<i>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</i> Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 436 orang
<i>Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup</i> Sasaran: Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan hidup	a. Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya, 600 orang b. Jumlah generasi/masyarakat di bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilatih, 550 orang c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan, 500 unit sekolah/kampus d. Jumlah anggota saka kalpataru yang peduli dan berbudaya lingkungan, 1.000 orang
<i>Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i> Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 82,00 (A) di Tahun 2017.

Ket : * = Pembiayaan pada Tahun 2017 sebanyak 810 orang yang terdiri dari 210 orang rekrutmen baru dan 600 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan tahun ke-II (rekrutmen tahun 2016).

IV. CAPAIAN KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, maka dalam kerangka pembangunan nasional bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, program kerja Badan P2SDM terakomodir dalam 1 (satu) penyelenggaraan program *dengan nomenklatur Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM*. Sasaran penyelenggaraan program tersebut adalah *meningkatkan daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.

Penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dijabarkan lebih lanjut dalam 5 (lima) butir kegiatan utama dan 1 (satu) butir kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

- a. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LHK;
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
- e. Peningkatan Penyuluhan;
- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM.

Target Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja unit organisasi Badan P2SDM selama periode Tahun 2015 – 2019 dan Target Kinerja Tahun 2016 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Kinerja Program (IKP) Badan P2SDM Tahun 2016 (APBN)

No.	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2015 – 2019	Target Kinerja Tahun 2016
1.	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak, dan SDM LHK kompeten	25.400 orang	1.100 orang
2.	Jumlah SDM LHK yang meningkat kapasitasnya	57.640 orang	4.680 orang
3.	Jumlah generasi lingkungan meningkat kapasitasnya, dan Jumlah sekolah/kampus yang berbudaya LH	71.200 orang 5.000 unit	4.500 orang 700 unit
4.	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang meningkat kapasitasnya	5.500 unit KTH dan koperasi	472 unit KTH dan koperasi

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan masing – masing pelaksanaan kegiatan utama maupun kegiatan dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM Tahun 2016, telah ditetapkan rincian output kegiatan sebagai basis pengalokasian anggaran.

Tabel 4. Target Kinerja dan Rincian Output Kegiatan Tahun 2016 berdasarkan APBN 2016

No.	Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2016	Output Kegiatan TA. 2016
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	2.277 orang	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 600 orang * b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	3.980 orang	a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 2.890 orang b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 40 orang c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 600 orang e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan meningkat kapasitasnya, 450 orang
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	719 orang	- Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 700 orang **
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	• 1.500 orang • 700 sekolah/kampus, dan • 3.000 orang	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 500 orang b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 1.000 orang c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 700 unit sekolah/kampus d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 3.000 orang

No.	Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2016	Output Kegiatan TA. 2016
5.	Peningkatan Penyuluhan	472 unit KTH	a. Jumlah kelas kelompok tani desa – desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 450 unit KTH b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 22 unit c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan, 450 orang
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Badan P2SDM	81 poin	- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016

Keterangan :

* = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 1.777 orang yang terdiri dari 600 orang sesuai Renja dan 1.177 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan;

** = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 719 orang sesuai dengan keberadaan siswa kelas III yang dikelola pada tahun ajar 2015-2016.

2. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016

Alokasi pagu anggaran APBN Badan P2SDM TA. 2016 untuk mendukung Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 360.838.691.000,-. Sumber dan tersebut terbagi atas Rupiah Murni (RM)

sebesar Rp. 315.838.691.000,- (87,53%) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 45.000.000.000.000,- (12,47%). Rincian alokasi anggaran Badan P2SDM tercantum pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Rincian Alokasi Anggaran APBN Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2016

(dalam ribuan rupiah)		
No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	66.628.000
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	145.565.000
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	77.453.691
4.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	18.428.000
5.	Peningkatan Penyuluhan	20.699.000
6.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM	31.065.000
Jumlah		360.838.691

Pada Tahun 2016 ini, pemerintah melakukan efisiensi dengan melakukan penghematan anggaran melalui APBN-Perubahan. Perubahan APBN dilakukan dengan tujuan mengefisienkan kegiatan terutama untuk kegiatan lelang, perjalanan dinas, rapat dan konsinyering. Anggaran akan lebih difokuskan kepada program-program prioritas ditengah

tantangan perekonomian global yang terjadi saat ini.

Pada saat APBN-P Tahun 2016 disahkan, pagu anggaran Badan P2SDM mengalami pengurangan pagu sebesar Rp. 15.147.146.000,- menjadi Rp. 345.691.545.000,-. Rincian perubahan alokasi pagu APBN-P Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Distribusi Alokasi Anggaran APBN-P Satker Pusat dan UPT
(dalam ribuan rupiah)

SATUAN KERJA	JENIS BELANJA					JUMLAH (2+5+6)
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL	
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
Setbadan P2SDM	14.624.700	2.492.195	12.147.052	14.639.247	73.050	29.336.997
Pusrenbang SDM	0	1.066.200	64.561.572	65.627.772	70.000	65.697.772
Pusluh	0	1.066.200	17.280.853	18.347.053	200.000	18.547.053
Puslatmas dan PGL	4.080.205	2.665.500	9.970.371	12.635.871	212.000	16.928.076
Pusdiklat SDM LHK	13.119.348	2.665.500	27.227.610	29.893.110	30.000	43.042.458
BDLHK Pematangsiantar	6.262.140	1.421.600	3.766.424	5.188.024	1.181.410	12.631.574
BDLHK Pekanbaru	7.064.470	1.826.240	3.284.854	5.111.094	1.258.020	13.433.584
BDLHK Bogor	8.057.100	1.663.940	5.765.349	7.429.289	972.334	16.458.723
BDLHK Kadipaten	7.343.537	1.421.600	4.153.763	5.575.363	1.210.786	14.129.686
BDLHK Samarinda	5.938.741	2.262.397	3.165.879	5.428.276	1.716.575	13.083.592
BDLHK Makassar	7.705.787	1.421.600	6.889.628	8.311.228	967.579	16.984.594
BDLHK Kupang	6.877.046	1.476.675	4.155.804	5.632.479	2.371.496	14.881.021
SMKKN Pekanbaru	4.399.099	1.739.005	6.268.374	8.007.379	1.028.147	13.434.625
SMKKN Kadipaten	4.160.222	1.110.625	6.597.748	7.708.373	1.527.030	13.395.625
SMKKN Samarinda	3.126.818	1.548.658	5.740.989	7.289.647	4.592.535	15.009.000
SMKKN Makassar	3.958.280	1.110.625	7.337.097	8.447.722	787.623	13.193.625
SMKKN Manokwari	6.227.560	1.910.275	6.364.837	8.275.112	1.000.868	15.503.540
JUMLAH	102.945.053	28.868.835	194.678.204	223.547.039	19.199.453	345.691.545

Akibat adanya perubahan pagu anggaran pada Badan P2SDM beberapa target/output kegiatan disesuaikan kembali agar kegiatan yang dilaksanakan tetap dapat menunjang keberhasilan program peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM Tahun 2016. Target tersebut mengalami perubahan dengan

mempertimbangkan agar tetap terciptanya belanja barang yang berkualitas namun tetap dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Perubahan target/output sesuai pagu anggaran APBN-P terdapat pada 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai rincian pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Perubahan target/output kegiatan akibat adanya perubahan pagu APBN-P Badan P2SDM Tahun 2016

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
Perencanaan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten</i>	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 600 orang * b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya 500 orang
Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i>	a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 2.885 orang b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 40 orang c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 2 unit KHDTK d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 600 orang e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 450 orang
Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan Sasaran: <i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i>	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 700 orang **
Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup</i>	a. Jumlah kader lingkungan hidup meningkat kapasitasnya, 400 orang b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 1.000 orang c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup(adiwiyata) 700 unit sekolah/kampus d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 2.500 orang
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 450 KTH b. Jumlah koperasi KTH yang dibentuk, 22 unit c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 15 unit d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan, 450 orang
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Sasaran: <i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM</i>	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 81,00 (A) di Tahun 2016.

Keterangan :

* = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 1.777 orang yang terdiri dari 600 orang sesuai Renja dan 1.177 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan;

** = Pembiayaan sesuai RKAKL APBN sebanyak 719 orang sesuai dengan keberadaan siswa kelas III yang dikelola pada tahun ajar 2015-2016.

3. PROGRESS KEMAJUAN TAHUN BERJALAN

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN S/D TAHUN BERJALAN DAN PROGNOSIS S/D DESEMBER 2016

Realisasi anggaran pada Badan P2SDM hingga bulan Agustus 2016 telah terserap sebesar Rp. 271.933.623.003,- (63,04% pagu anggaran APBN-P Badan P2SDM) serta realisasi fisik sebesar 65,71%. Prognosis realisasi anggaran Badan

P2SDM hingga akhir Desember 2016 adalah Rp. 340.540.741.000,- (98,51%). Capaian pelaksanaan kinerja per satuan kerja lingkup Badan P2SDM s.d Agustus 2016 tercantum pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Capaian pelaksanaan kinerja s.d Agustus 2016

No.	Satuan Kerja	Pagu	s.d Agustus 2016		Realisasi Fisik (%)
			Realisasi	%	
A. UNIT KERJA PUSAT					
1	Sekretariat Badan	29.336.997.000	19.876.537.179	67,75	69,33
2	Pusrenbang	65.697.772.000	41.724.689.854	63,51	70,66
3	Pusdik LHK	43.042.458.000	26.185.026.300	60,84	61,14
4	Puslatmas GL	16.928.076.000	8.855.789.343	52,31	53,66
5	Pusluh	18.547.053.000	10.361.810.232	55,87	58,57
B. BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
6	BD LHK Bogor	16.458.723.000	10.993.472.434	66,79	68,58
7	BD LHK P.Siantar	12.631.574.000	8.476.207.412	67,13	67,18
8	BD LHK Samarinda	13.083.592.000	8.825.952.576	67,46	69,87
9	BD LHK Makassar	16.984.594.000	11.078.160.017	65,22	65,39
10	BD LHK Pekanbaru	13.433.584.000	9.794.318.651	72,91	72,95
11	BD LHK Kadipaten	14.129.686.000	9.706.587.069	68,70	70,25
12	BD LHK Kupang	14.881.021.000	10.721.128.895	72,05	76,15
C. SMK KEHUTANAN NEGERI					
13	SMKKN Manokwari	15.503.540.000	8.550.144.961	55,15	57,83
14	SMKKN Kadipaten	13.395.625.000	8.303.003.970	61,98	62,46
15	SMKKN Makassar	13.193.625.000	6.801.406.118	51,55	54,37
16	SMKKN Samarinda	15.009.000.000	9.669.342.867	64,42	70,17
17	SMKKN Pekanbaru	13.434.625.000	8.007.045.125	59,60	59,62
JUMLAH A + B + C		345.691.545.000	217.933.623.003	63,04	65,71

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016, Kementerian LHK mengalami penghematan melalui mekanisme *self blocking* sebesar Rp. 871.727.007.000,-. Menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, berdasarkan Surat Menteri LHK No. S.389/MENLHK/SETJEN/SET1/9/2016 tentang *Self Blocking* anggaran KLHK TA 2016 Tahap ke-2, Badan P2SDM mengalami penghematan (*self blocking*) sebesar Rp. 13.624.030.000,-. Hal

tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Instruksi Presiden tersebut adalah dengan melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui mekanisme blokir mandiri (*self blocking*).

Tabel 9. Rincian penghematan (*self blocking*) per satker lingkup Badan P2SDM Tahun 2016
(dalam ribuan rupiah)

SATUAN KERJA	APBN	APBNP		INPRES NOMOR 8 TAHUN 2016	
		Penghematan	Anggaran	<i>Self Blocking</i>	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Setbadan P2SDM	31.065.000	1.728.003	29.336.997	2.709.300	26.627.697
Pusrenbang SDM	66.628.000	930.228	65697772	1.347.770	64.350.002
Pusluh	20.699.000	2.151.947	18547053	1.500.000	17.047.053
Puslatmas dan PGL	18.428.000	1.499.924	16.928.076	2.258.320	14.669.756
Pusdiklat SDM LHK	45.702.000	2.659.542	43.042.458	2.758.100	40.284.358
BDLHK Pematangsiantar	12.963.000	331.426	12.631.574	304.900	12.326.674
BDLHK Pekanbaru	13.765.000	331.416	13.433.584	212.130	13.221.454
BDLHK Bogor	16.853.000	394.277	16.458.723	515.630	15.943.093
BDLHK Kadipaten	14.474.000	344.314	14.129.686	414.910	13.714.776
BDLHK Samarinda	13.439.000	355.408	13.083.592	323.380	12.760.212
BDLHK Makassar	17.406.000	421.406	16.984.594	928.390	16.056.204
BDLHK Kupang	15.263.000	381.979	14.881.021	351.200	14.529.821
SMKKN Pekanbaru	14.149.000	714.375	13.434.625	0	13.434.625
SMKKN Kadipaten	14.110.000	714.375	13.395.625	0	13.395.625
SMKKN Samarinda	15.609.000	600.000	15.009.000	0	15.009.000
SMKKN Makassar	13.908.000	714.375	13.193.625	0	13.193.625
SMKKN Manokwari	16.377.691	874.151	15.503.540	0	15.503.540
JUMLAH	360.838.691	15.147.146	345.691.545	13.624.030	332.067.515

Tabel 10. Capaian indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM s/d Agustus 2016

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi	% Capaian
1. Perencanaan Pengembangan SDM	<i>Tersedianya tenaga bakti rimbawan dlm mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak & SDM LHK kompeten</i>			
	a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang	600 orang	600 orang	100,00 %
	b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang	500 orang	331 orang	51,06 %
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	<i>Meningkatnya kapasitas SDM LHK</i>			
	a. Jumlah Kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 35.000 orang	2.885 orang	2.362 orang	81,87 %
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa(S2 dan S3), 340 orang	40 orang	35 orang	87,50 %
	b. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	2 unit	0 unit	0,00 %
	d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang	600 orang	600 orang	100,00 %
	e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang	450 orang	360 orang	80,00 %
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	<i>Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan</i>			
	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	700 orang	713 orang	101,86 %
4. Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	<i>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dan Generasi Lingkungan hidup</i>			
	a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang	400 orang	241 orang	60,25 %
	b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang	1.000 orang	845 orang	84,50 %
	c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus	700 unit	140 unit	20,00 %
	d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang	2.500 orang	1.616 orang	64,64 %

Kegiatan	Sasaran / Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi	% Capaian
5. Peningkatan Penyuluhan	<i>Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>			
	a. Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH	450 unit	0 unit	0 %
	b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit	22 unit	-	40,00 %*
	c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit	15 Unit	-	40,00 %*
	d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masy di desa – desa hutan, 5.000 orang	450 orang	282 orang	62,67 %
6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi</i>			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A)	81 Poin	54 Poin	66,66 %

Ket: * = Seluruh unit sudah memiliki SK dan Progres Fasilitasi tahap 1 sebesar 40%

Capaian realisasi fisik kegiatan Badan P2SDM hingga bulan September 2016 dapat dilihat pada tabel 10 di atas. Namun, dengan adanya mekanisme penghematan (*self blocking*), tidak sepenuhnya anggaran APBN-P pada setiap satker lingkup Badan P2SDM dapat

digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Apabila hingga akhir Bulan Desember tahun 2016 mekanisme penghematan (*self blocking*) ini tetap dilaksanakan, maka dampaknya adalah target pada beberapa kegiatan tidak dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan.

V. RENCANA KERJA TAHUN 2017

Nama Unit Organisasi	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kode Program	:	029.08.10
Nama Program	:	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Sasaran Program	:	Meningkatnya daya saing SDM LHK
Program Prioritas Nasional	:	1. Revolusi Mental 2. Antar Kelompok Pendapatan 3. Desa dan Kawasan Pedesaan

Alokasi pagu anggaran RAPBN TA. 2017 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp. 307.831.468.000,-. Rincian alokasi anggaran berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan berdasarkan sumber

dana dapat dilihat pada Tabel 10 berikut. Distribusi alokasi anggaran per masing-masing kegiatan pada satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Tabel 11. Sedangkan target kinerja berdasarkan pagu RAPBN Tahun 2017 tercantum pada Tabel 12.

Tabel 11. Alokasi anggaran Badan P2SDM berdasarkan jenis belanja dan sumber dana.

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Belanja				Sumber Dana			Jumlah
Belanja Pegawai	Belanja Barang		Belanja Modal				
	Operasional	Non-Operasional		RM	PNBP/BLU	PDN/PHLN	
115.903.839*)	29.554.947	147.295.185	15.077.497	255.775.626	50.199.642	1.856.200	307.831.468

*) termasuk Gaji Induk + uang makan, Tunjangan Kinerja (13 bulan) dan transito

Tabel 12. Distribusi alokasi anggaran per masing – masing satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM

(dalam ribuan rupiah)

No.	Satuan Kerja	Jumlah
A. Satuan Kerja Pusat		
1.	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	41.961.300
2.	Pusat Diklat SDM LHK	37.765.000
3.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	13.400.000

No.	Satuan Kerja	Jumlah
4.	Pusat Penyuluhan	8.450.000
5.	Sekretariat Badan P2SDM	29.757.568
B. UPT Balai Diklat LHK		
1.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pematangsiantar	12.622.800
2.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Pekanbaru	13.332.800
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Bogor	13.540.000
4.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kadipaten	13.600.000
5.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Samarinda	11.552.800
6.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Makassar	15.416.000
7.	Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Kupang	13.033.200
C. UPT SMK Kehutanan Negeri		
1.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Pekanbaru	16.600.000
2.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Kadipaten	16.350.000
3.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda	15.200.000
4.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Makasar	17.850.000
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Manokwari	17.400.000
Jumlah A + B + C		307.831.468

Tabel 13. Target rencana kinerja Badan P2SDM sesuai RPJM dan Pagu Indikatif berdasarkan prioritas nasional Tahun 2017

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017		
			RPJM	Renstra BP2SDM	Pagu RAPBN
1. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL					
Program Prioritas Nasional: Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa					
Kegiatan Prioritas Nasional: Pendidikan Berbasis Karakter					
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	900 unit	1.200 unit	500 sekolah/kampus
2.	Penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur SDM LHK	Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat	7.000 orang	8.400 orang	3.000 orang
3.		Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya	3.500 orang	4.390 orang	210 orang
4.	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Jumlah tenaga bakti rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	3.500 orang	4.390 orang	210 orang (pembiayaan sebanyak 810 orang) *
Program Prioritas Nasional : Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa					
Kegiatan Prioritas Nasional : Lingkungan Satuan Pendidikan yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan					
5.	Penyelenggaraan Pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	420 orang	420 orang	436 orang
2. PRIORITAS NASIONAL ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN					
Program Prioritas Nasional: Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil					
Kegiatan Prioritas Nasional: Koperasi dan Kemitraan Usaha					
1.	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah kelas kelompok tani hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	1.100 unit KTH	1.350 unit KTH	450 unit KTH
2.		Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk	120 unit	153 unit	10 unit koperasi
Program Prioritas Nasional: Perhatian Khusus Kepada Usaha Mikro dan Kecil					
Kegiatan Prioritas Nasional: Keterampilan Usaha					
3.	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS).	50 unit	68 unit	10 unit

No.	Kegiatan K/L	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017		
			RPJM	Renstra BP2SDM	Pagu RAPBN
3. PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PEDESAAN					
Program Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA Desa dan Kawasan Termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan					
Kegiatan Prioritas Nasional : Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan SDA, Pengelolaan LH dan Teknologi Tepat guna					
1.	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	1.000 orang	1.350 orang	300 orang
2.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan pengembangan generasi Lingkungan Hidup	Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih meningkat kapasitasnya	2.240 orang	3.140 orang	600 orang
3.		Jumlah generasi/masyarakat di bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilatih	2.000 orang	2.400 orang	550 orang
4. KEGIATAN NON PRIORITAS NASIONAL					
1.	Perencanaan Pengembangan SDM	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	2.100 orang	3.000 orang	500 orang
2.	Penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur SDM LHK	Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3)	75 orang	85 orang	85 orang
3.		Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	2 unit	2 unit	2 unit
4.		Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya	1.000 orang	1.350 orang	300 orang
5.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan pengembangan generasi Lingkungan Hidup	Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan	9.000 orang	13.500 orang	1.000 orang
6.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan P2SDM	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	82 poin	82 poin	82 poin

Ket : * = Pembiayaan pada Tahun 2017 sebanyak 810 orang yang terdiri dari 210 orang rekrutmen baru dan 600 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan tahun ke-II (rekrutmen tahun 2016).

VI. PENUTUP

Rencana kerja Badan P2SDM Tahun 2017 ini disusun sebagai pedoman dan acuan setiap Satker lingkup Badan P2SDM dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sesuai arahan Presiden terkait kebijakan Tahun 2017 mengenai prioritas nasional dan *money follow program*, setiap satker harus menerapkannya dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga dapat mendukung kinerja kementerian/lembaga dan pembangunan nasional.

Badan P2SDM yang memiliki tugas membentuk SDM LHK yang kompeten dan berkualitas harus dapat terus

berkembang dengan meningkatkan kinerja yang produktif dan profesional. Setiap ASN harus memiliki komitmen untuk bekerja lebih keras serta disiplin. Tak lupa pula menanamkan sikap integritas, kerja keras dan gotong royong.

Akhirnya, melalui kerja sama dari setiap elemen penyelenggara pembangunan, semoga rencana kerja Badan P2SDM yang telah disusun ini dapat mendorong kinerja SDM yang lebih baik serta memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

LAMPIRAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2017

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
1	Peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM				307.831,5*				
1	Perencanaan dan Pengembangan SDM				41.961,3*				
		Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten							
			a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH	210 orang (pembiayaan sebanyak 810 orang) **		Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	142 KPHP 81 KPHL 60 KPHK
			b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	500 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Sumsel, Lampung, Kep. Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Jateng, DKI Jakarta, DIY, Jabar, Jatim, Bali, NTB, NTT, Banten, Kalsel (Uji Kompetensi dilaksanakan di Ibukota Provinsi)
2	Peningkatan Penyuluhan				8.450,0*				
		Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat							
			a. Jumlah kelas kelompok tani hutan meningkat dari pemula ke madya melalui penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha	450 KTH		Antar kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Koperasi dan Kemitraan usaha	33 Provinsi (DKI Jakarta tidak ada)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			b. Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk	10 unit		Antar kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Koperasi dan Kemitraan usaha	Kab. Lombok Utara (NTB), Kab. Ciamis (Jabar), Kab. Gunung Kidul (DIY), Kab. Pacitan (Jatim), Kab. Purworejo (Jateng), Kab. Pasaman (Sumbar), Kab. Lebak (Banten), Kab. Gianyar (Bali), Kab. Lampung Timur (Lampung), Kab. Konawe Utara (Sulawesi Tenggara)
			c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	10 unit		Antar kelompok Pendapatan	Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil	Keterampilan usaha	Kab. Pidie (Aceh), Kab. Pringsewu (Lampung), Kab. Tabanan (Bali), Kab. Pandeglang (Banten), Kab. Majalengka (Jabar), Kab. Batang (Jateng), Kab. Gunung Kidul (DIY), Kab. Banyuwangi (Jatim), Kab. Bone (Sulsel), Kab. Kubu Raya (Kalbar)
			d. Jumlah tenaga pendamping handal dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan	300 orang		Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan SDA desa dan kawasan termasuk transmigrasi dan sumber daya hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan LH dan teknologi tepat guna	KALTARA 17 Unit (Bulungan, Nunukan, Tarakan, Malinau); NTT 35 Unit (Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ngada, Manggarai, Sumba Barat, Lembata, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya); MALUKU 30 Unit (Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Ambon); LAMPUNG 30 Unit (Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan); BENGKULU 35 Unit (Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Seluma, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah); MALUKU UTARA 30 Unit (Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate); BANGKA BELITUNG 28 Unit (Bangka Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur);

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
									SULAWESI BARAT 30 Unit (Mamuju, Majene Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Utara); PAPUA BARAT 30 Unit (Fak Fak, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Wondama); SUMATERA BARAT 35 Unit (Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Dharmasraya, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang)
3.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK				128.762,6*				
		Meningkatnya kapasitas SDM LHK							
			a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat	3.000 orang		Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Pusdiklat SDM LHK : 375 orang BDLHK Pekanbaru : 300 orang BDLHK Bogor : 360 orang BDLHK Makassar : 405 orang BDLHK Samarinda : 300 orang BDLHK Kupang : 300 orang BDLHK Pematangsiantar : 360 orang BDLHK Kadipaten : 300 orang
			b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 & S3)	85 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusdiklat SDM LHK
			c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan	2 unit KHDTK		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	- KHDTK Pondok Buluh, Pematang Siantar (Sumatera Utara), - KHDTK Sawala, Majalengka (Jawa Barat)
			d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya	210 orang		Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	BDLHK Pekanbaru : 90 orang BDLHK Bogor : 30 orang BDLHK Makassar : 60 orang BDLHK Samarinda : 30 orang

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			e. Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya	300 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	BDLHK Pekanbaru: 30 orang BDLHK Bogor: 60 orang BDLHK Makassar: 60 orang BDLHK Samarinda: 30 orang BDLHK Kupang: 30 orang BDLHK Pematangsiantar: 30 orang BDLHK Kadipaten: 60 orang
4.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan				85.200,0*				
		Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan							
			Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	436 orang		Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	SMKKN Kadipaten : 97 orang SMKKN Pekanbaru : 98 orang SMKKN Makassar : 101 orang SMKKN Samarinda : 87 orang SMKKN Manokwari : 53 orang
5.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan				13.400,0*				
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan hidup							
			a. Jumlah kader lingkungan yang meningkat kapasitasnya	600 orang		Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan SDA desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan LH dan teknologi tepat guna	Kab. Jombang, (Jawa Timur), Pekanbaru (Riau), Sumatera Utara, Kab. Banjarnegara (Jawa Tengah)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
			b. Jumlah generasi/ masyarakat di bidang teknis lingkungan hidup dan kehutanan yang dilatih	550 orang		Desa dan Kawasan Pedesaan	Pengelolaan SDA desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan SDA, pengelolaan LH dan teknologi tepat guna	- Pelatihan Perilaku Ramah lingkungan – DAS Ciliwung (Kota Bogor, Kab. Bogor, Depok) – DAS Serayu (Kab. Banjarnegara) – DAS Bengawan Solo (Kota Solo) - Pelatihan Pengelolaan Sampah (Kota Semarang, Kab. Klaten) - Pelatihan Pengelolaan Wana Wisata (KPH Yogyakarta) - Pelatihan <i>Green Entrepreneurship</i> (Gorontalo) - Pelatihan Lebah Madu (Kadipaten, Kab. Majalengka) - Pelatihan Pengamanan Hutan (Samarinda) - Pelatihan pengolahan kayu putih (Biak) - Pelatihan hasil hutan bukan kayu (HHBK) tanaman bambu (Ternate) - Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (BDLHK Samarinda) - Pelatihan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (BDLHK Pekanbaru)
			c. Jumlah sekolah/ kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan	500 unit sekolah/ kampus		Revolusi Mental	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Pembinaan dan penilaian sekolah/kampus adiwiyata di 34 Provinsi
			d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan	1.000 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	- Pengenalan Saka Kalpataru di DAS Toba : – Sebanyak 200 orang (Kab.: Toba Samosir, Simalungun, Asahan, Tanjung Balai) – Sebanyak 200 orang (Kab.: Parapat, Porsea, Balige) - Pengenalan Saka Kalpataru DAS Kapuas : – Sebanyak 200 orang (Kab.: Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau) – Sebanyak 200 orang (Kab.: Sanggau, Landak, Pontianak, Kota Pontianak) - Sebanyak 200 orang (Kab.: Sambas, Bengkayang, Singkawang, Kubu Raya)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
6.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Badan P2SDM				29.757,6*				
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yg baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM							
			Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal.	82,00		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Jakarta

Ket : * = Termasuk layanan internal dan layanan perkantoran

** = Pembiayaan pada Tahun 2017 sebanyak 810 orang yang terdiri dari 210 orang rekrutmen baru dan 600 orang pembiayaan tenaga bakti rimbawan tahun ke-II (rekrutmen tahun 2016).